

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abu Huraerah. *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, Bandung, 2007
- Abdul Wahid, dan Muhammad Irfan *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*, Refika Aditama, Bandung, 2001
- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Keamanan dan Keselamatan Negara*, PT Trafindo Persada, Jakarta, 2002
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian Pertama*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta 1994
- Andi Hamzah, *Korban Kekerasan*, Arikha Media Cipta, Jakarta 1994
- Arief Gosita, *Bunga Rampai Viktimisasi*, Eresco, Bandung, 1995
- Arief Gosita, Masalah Korban Kejahatan (dalam: Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum., , *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014
- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1983
- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1989
- Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011
- Bardan Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- Buku Budi Winarno, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta, Media Pressindo, 2002
- E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Jakarta:Universitas Jakarta, 1958
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gutom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Antara Norma dan Realita*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2008
- Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak*, PT Gramedia Pustaka, Jakarta, 2010
- Hallway dalam Johannes supranto. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta, Cet. 1, Penerbit Rineka Cipta, 2003

- Hans Kelsen (terjemahan oleh Somardi), *General Theory Of law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empiris*, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007
- Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015
- J.E. Sahetapy, *Kausa Kejahatan*. Pusat Studi Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1979
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan RI, Jakarta, 2006
- Joice Soraya, *Viktimologi: Kajian Dalam Perspektif Korban Kejahatan*, MNC Publishing, Jakarta, 2022
- Kamus Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1982
- Koeswadji, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana, Cetakan I*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995
- Laurensius Arliman, *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2015
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945* (sesuai dengan urutan Bab, pasal dan ayat), Sekretaris Jendral MPR RI, Jakarta, 2010
- Masriani, M., & Sujianto, S. (2017). *Implementasi kebijakan tentang perlindungan anak (studi kasus anak-anak pengemis di kecamatan mandau)* (Doctoral dissertation, Riau University).
- Masri Singaribu, dkk, *Metode dan Proses Penelitian dalam Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta, 1998
- Maya Indah S, *Perlindungan Korban, Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, PrenadaMedia Group, Jakarta, 2014
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta, 1988
- Mudzakkir, *Persepsi Korban Kejahatan Terhadap Peradilan Pidana, Lembaga Penelitian*, UII, 1996
- Muladi, *lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985

- Muladi dan Bardan Nawawi Arif, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumi, Bandung, 1992
- Munir Fuadi, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Refika Aditama, Bandung, 2009
- Ni'matul Huda, *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi*, UII Press, Yogyakarta, 2007
- O.C. Kaligis, *Antologi Tulisan Ilmu Hukum Jilid-3*, Alumni, Bandung, 2007
- Philippus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987
- Prayudi, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1991
- R. Atang Ranoemihardja, *Hukum Acara Pidana*, Tarsito, Bandung, 1997
- Riduan Syahrani, *Perlindungan hukum terhadap korban dan pelaku kejahatan*, Alumni Bandung, 1983
- Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta : Aksara Baru, 1983
- Romli Atmasasmita, *Peradilan Anak Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1997
- Romli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1982
- Romli Atmasasmita, *Teori Kapita Selekta Kriminologi*, PT. Eresco, Bandung, 1992
- R. Soesilo, *Pelajaran Lengkap Hukum Pidana*, Pelita, Bogor 1989
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta:Kompas, 2008
- Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2008
- Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta, PT. Sinar Grafika, 2008
- Sobirin Malian dan Suparman Marzuki, *Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*, UII Press, Yogyakarta, 2002
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1986
- Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994

- Sorjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali, Jakarta, 1987
- Supriyadi W. Eddyono, “*Pengantar Konvensi Hak Anak*”, Makalah Pada Kursus HAM untuk Pengacara. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta, 2005
- Sujanto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Ghalia Indonesia, 1986
- Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (t:t Gitamedia Press, t.t)
- Tb. Ronny Rahman Nitibaskara, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, Jakarta, Buku Kompas, 2006
- Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, CV.Mandar Maju, Bandung. 2009
- Wasis SP, *Pengantar Ilmu Hukum*, Malang, UMM Press, 2002
- W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta 1984
- Wirdjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Eresco, Bandung, 1986
- Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016
- Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006
- Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, cetakan Ke-Enam, Jakarta, Sinar Grafika, 2004
- Yul Ernis, *Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Penerapan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Penerbit Pohon Cahaya, Jakarta, 2016
- Zainal Abidin, *Hukum Pidana Prapanca*, Jakarta 1962

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana (KUHP);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan saksi dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia;

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas;

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak;

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak;

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Koordinasi Pemantauan Penyelenggaraan Perlindungan Anak;

Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak;

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan;

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak;

Deklarasi Jenewa tentang “Hak-Hak Anak Tahun 1924” yang kemudian dikukuhkan dalam resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Nomor 1386 (XIV) tanggal 20 November 1959 mengenai “*Declaration of The Right of The Child*”;

Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuses of Power oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sebagai hasil dari *The Seventh United Nation Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* di Milan, Italia, pada September 1985;

Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990;

Kongres PBB tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan Terhadap Pelaku Kejahatan ke IX (*Ninth UN Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*);

C. Artikel/Tesis

Bardan Nawawi Arif, *Perlindungan Korban Kejahatan dalam Proses Peradilan Pidana*, Jurnal hukum Pidana, Vol. I/No.I/1998

Ekandari Sulistyaningsih dan Faturachman, *Dampak Sosial Psikologis Perkosaan*, Buletin Psikologi Tahun X., No 1 tahun 2002

Hana Aulia Putri, *Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak Korban Pemerkosaan dalam Lingkungan Keluarga*, Jurnal Lex Renaissance Vol 6, No 1, 2021

Karina Chaerunnisa, *Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pada Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Dibawah Umur*, Jurnal Lex Crimen Vol VIII, No 11, 2019

Tim Penyusun, *“Institut For Criminal Justice Reform: Pengujian Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat,”* Artikel Institute For Criminal Justice Reform, Oktober 2015

Yurnal, *“Mahkamah Syar’iyah dalam Perspektif Politik Hukum Indonesia,”* Al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 5, no. 2 (Desember 2019)

D. Putusan

Putusan Mahkamah Syar’iyah Bireuen Nomor : 6/JN/2023/MS.Bir;

Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor : 27/Pid.Sus/2021/PN Bir;

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1565 K/Pid/1991 tertanggal 16 September 1993;

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 367 K/Pid/1998 tertanggal 29 Mei 1998;

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 545 K/Pid.Sus/2011.